

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin, R. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, Yogyakarta.
- Ilmu Forensik - Max M. Houck: *Metode Modern untuk Memecahkan Masalah Kejahatan*. (n.d.). (n.p.): Pinang.
- Iwan Aflanie, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusuma, M. S. E. 2012. *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarwat, A. 2011, *Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran*, DU Publishing, Jakarta.
- Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Waluyadi. 2007. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Yudianto, A. 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal

- Brahmana, H. S. 2019. *Teori dan Hukum Pembuktian*.
- Hatta, M. 2018. *The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia*. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 29(1),
- Hatta, M., & Zulfan, S. 2019. *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 19(1).
- Khairunisa, T., & Priyana, P. 2022. *Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi*. Wajah Hukum, 6(1), 1-5.

Makie, I. 2016. *Fungsi Autopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lex Privatum, 4(5),

Nugroho, B. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. Yuridika, 32(1), 17-36.

Sagai, B. Y. D. 2017. *Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun*. Lex Crimen, VI(8).

Yaqin, A. 2007. *Legal Research and Writing Malaysia*. Malayan Law Journal SDN BHD, (1)

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan kedokteran

Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian

Instruksi KAPOLRI Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Pengajuan dan Pencabutan Visum Et Repertum

Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 519/PID/2022/PT SBY.

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 498 K/PID/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.